

KONSEP DIGITALISASI KARTU AK/1 DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI MEDIA PENYALURAN INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN

Awaludin Abid¹⁾, Irwan Oyong²⁾, Hasnan Afif³⁾,
Izzatil Ishmah Fajrin⁴⁾, Arief Munandar⁵⁾

^{1), 2), 3), 4), 5)} Magister Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta

Jl Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55281

Email : abid.awaludin@gmail.com¹⁾, irwan_oyong@ymail.com²⁾, hasnan.afif@gmail.com³⁾,
izzatilishmahfajrin@gmail.com⁴⁾, kelima@amikom.ac.id⁵⁾

Abstrak

Kartu AK/1 yang merupakan syarat wajib untuk dimiliki oleh pencari kerja sebagai bukti diri, fungsinya berakhir pada saat proses pencarian kerja selesai, dan dikembalikan oleh perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja. Belum ada keberlanjutan fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan track record tenaga kerja seperti curriculum vitae, pengalaman kerja, dan preferensi pekerjaan yang bisa dimanfaatkan sebagai media penyaluran informasi lowongan pekerjaan dan sumber data angka tenaga kerja.

Fungsi baru tersebut dapat ditambahkan dengan proses pengembangan digitalisasi kartu AK/1. Dengan adanya penghubung digital dan sinergi antara pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan negeri atau swasta, dan jasa penyedia informasi lowongan pekerjaan akademisi maupun swasta, maka akan dihasilkan sistem penyaluran informasi lowongan pekerjaan yang lebih baik.

Kata kunci : Konsep, Digitalisasi, Penyaluran Informasi, Informasi Lowongan Pekerjaan.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat).[1] Negara ini memiliki populasi penduduk yang tergolong muda karena sekitar setengah dari total penduduknya berumur di bawah 30 tahun. Dari dua faktor ini, bisa diindikasikan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan angkatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depannya.[2]

Para pencari kerja dituntut oleh perusahaan pemerintah maupun swasta untuk melengkapi dokumen dan juga berkas penting lainnya termasuk kartu AK/1 (Kartu Pencari Kerja). Fungsi pembuatan kartu AK/1 bukan sekedar memenuhi legalitas pemenuhan syarat melamar

pekerjaan, melainkan juga sebagai kartu identitas pencari kerja.

Gambar 1. Tampilan Depan Kartu AK/1 [3]

Gambar 2. Tampilan Belakang Kartu AK/1 [3]

Tampilan kartu AK/1 depan dan belakang yang sekarang terlihat seperti Gambar 1 dan Gambar 2 Form ini berlaku selama dua tahun dan setiap 6 (enam) bulan sekali diwajibkan melapor bagi pemiliknya, dan dikembalikan oleh perusahaan yang menerima bekerja kepada Dinas Tenaga Kerja yang bersangkutan. Kartu AK/1

memberikan manfaat timbal balik bagi pemerintah dan pencari kerja. Bagi pencari kerja kartu AK/I dapat memudahkan melamar pekerjaan. Sedangkan bagi Dinas Tenaga Kerja, kartu AK/I juga berfungsi untuk mendata tingkat pengangguran yang ada (berdasarkan perbandingan jumlah angkatan kerja, pemegang kartu AK/I dan kartu AK/I yang telah dikembalikan) serta menyusun langkah pemecahan masalah pengangguran.[4]

Tentunya sistem dan ketentuan yang berjalan saat ini akan terus membuat Dinas Tenaga Kerja melakukan pelayanan terkait pembuatan (baru dan ulang) kartu AK/I. Belum ada pengolahan data dan informasi lanjutan terkait dengan pencari kerja yang telah memiliki dan menggunakan kartu AK/I yang ada. Maka diperlukanlah kontribusi data dan masukan yang dihasilkan oleh Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) agar pemerintah dapat mengetahui data terkait ketenagakerjaan terbaru. Yang mana prosesi Sakernas dilakukan secara manual (kunjungan langsung) dan tentunya kurang efisien baik dari segi biaya maupun waktu pelaksanaan.

Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 dan 1978. Pada tahun 1986-1993, Sakernas diselenggarakan secara triwulanan di seluruh provinsi di Indonesia, sejak tahun 1994-2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan yaitu setiap bulan Agustus. Pada tahun 2002-2004, di samping Sakernas Tahunan dilakukan pula Sakernas Triwulanan. Pada tahun 2005-2010, pengumpulan data Sakernas dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari (Semester I) dan Agustus (Semester II).

Mulai tahun 2011 Sakernas dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV). Sakernas Triwulanan ini dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia, yang mengacu pada KILM (*The Key Indicators of the Labour Market*) yang direkomendasikan oleh ILO (*The International Labour Organization*). Hasil Sakernas Triwulan I, II, dan IV disajikan sampai tingkat provinsi (jumlah sampel 50.000 rumah tangga). Sementara Sakernas Triwulan III, disajikan sampai tingkat kabupaten/kota, karena jumlah sampel cukup besar sekitar 200.000 rumah tangga, di mana jumlah tersebut terdiri dari 50.000 rumah tangga merupakan sampel Sakernas Triwulanan dan 150.000 rumah tangga sampel Sakernas tambahan.[5]

Dari sisi perusahaan negeri atau swasta sendiri dalam menyampaikan informasi ketersediaan lowongan pekerjaan masih menggunakan media (situs web, iklan

dari masing-masing perusahaan, sehingga penyampaian informasi kepada pencari kerja belum memiliki cakupan yang luas dan tepat sasaran. Maka diajukanlah konsep digitalisasi kartu AK/I, yang dapat berfungsi untuk menyimpan data diri terkait ketenagakerjaan dan *curriculum vitae* dari setiap individu dengan usia produktif (15 tahun ke atas). Kartu AK/I Digital ini fungsinya tidak hanya akan berjalan pada saat mencari kerja, namun juga akan menjadi pencatat lokasi dan kondisi dari masing-masing individu apakah sudah bekerja atau masih mencari kerja dan memerlukan informasi lowongan pekerjaan yang telah dikumpulkan dari kolaborasi antar para penyedia lapangan pekerjaan.

2. Pembahasan

Pihak pemerintah melalui Sakernas mengumpulkan keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas. Meskipun demikian, informasi yang disajikan hanya informasi dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Informasi tersebut meliputi:

- Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
- Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan / mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).[5]

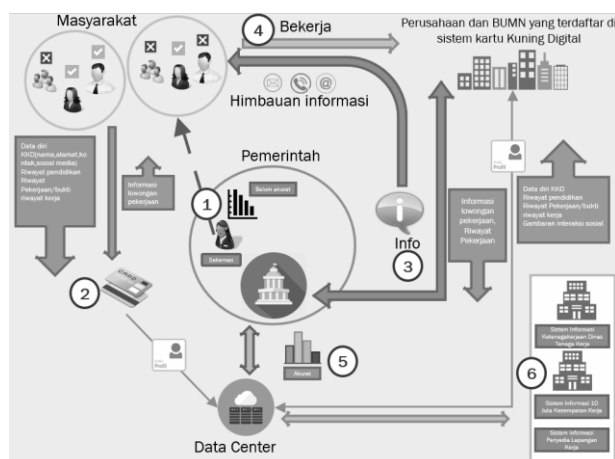
Contoh data survei penduduk tersaji pada Tabel 1 :

Tabel 1. Data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas

Jenis Kegiatan	2014		2015	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	181 169 972	182 992 204	184 599 615	186 100 917
2 Angkatan Kerja	125 316 991	121 872 931	128 301 588	122 380 021
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,17	66,60	69,50	65,76
b. Bekerja	118 169 922	114 628 026	120 846 821	114 819 199
c. Pengangguran Terbuka *)	7 147 069	7 244 905	7 454 767	7 560 822
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,70	5,94	5,81	6,18
3 Bukan Angkatan Kerja	55 852 981	61 119 273	56 298 027	63 720 896
a. Sekolah	15 899 591	16 769 494	16 514 465	16 734 963
b. Mengurus Rumah Tangga	32 853 393	36 019 249	32 488 589	38 203 701
c. Lainnya	7 099 997	8 330 530	7 294 973	8 782 232

*) Pengangguran Terbuka : Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan Usaha, Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan, Sudah Punya Pekerjaan tetapi belum dimulai bekerja
 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari penjelasan di atas mengenai sistem kerja Sakernas dapat dilihat bahwa data yang didapat hanya berasal dari sampel sehingga informasi yang dihasilkan mengenai jumlah ketenagakerjaan belum mencakup jumlah keseluruhan. Maka diperlukanlah sebuah sistem pendataan yang lebih menyeluruh dan *up-to-date*. Konsep kartu AK/I Digital ini akan dijabarkan melalui gambaran arsitektur teknologi seperti pada Gambar 3 .



Gambar 3. Arsitektur Teknologi

Penjelasan alur untuk arsitektur teknologi :

1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sistem yang masih digunakan pemerintah saat ini adalah Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) dan kita ketahui data yang diperoleh masih berasal dari sampel dan pendataan belum menyeluruh sehingga informasi yang diberikan mengenai ketenagakerjaan dapat dikatakan kurang akurat.
2. Pada tahap ini pembuatan kartu AK/I Digital dapat dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten, masyarakat atau pencari kerja datang dengan menyertakan data diri / KTP, riwayat pendidikan dengan menyertakan fotocopi ijazah, riwayat pekerjaan beserta bukti riwayat kerja dari perusahaan bagi yang pernah bekerja, data mengenai kontak yang dapat dihubungi dan keterkaitan dengan penggunaan media sosial. Keterkaitan media sosial di sini opsional karena ada beberapa perusahaan yang membutuhkan informasi tersebut. Data ini akan masuk ke data pusat.
3. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan negeri atau swasta, dan jasa penyedia informasi lowongan kerja dapat menghasilkan sistem yang terintegrasi dan menyalurkan informasi mengenai lowongan pekerjaan secara terarah. Kumpulan informasi yang relevan ini akan menghasilkan sebuah manfaat yang besar, dari pihak pencari pekerjaan sendiri memudahkan dalam pencarian informasi mengenai lowongan pekerjaan berdasarkan minat dan kemampuannya serta dari pihak

perusahaan dapat memperoleh data calon pekerja yang *reliable* sesuai dengan kriteria perusahaan. Dengan informasi itu perusahaan dapat melihat dengan cepat dan mudah dalam mengenali kelengkapan informasi calon pekerja.

4. Dengan adanya sistem ini memungkinkan sinkronisasi dari pihak perusahaan negeri atau swasta dengan jasa penyedia informasi lowongan pekerjaan sehingga penyaluran informasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Pencari kerja sendiri akan diuntungkan dengan penyediaan informasi lowongan yang jelas dan sesuai dengan minat dan kemampuan. Apabila sudah terjalin hubungan kerja antara pencari kerja dan sebuah perusahaan, maka dari sistem ini dapat langsung diperbaharui data mereka yang baru saja bekerja tersebut.

5. Dari penjelasan sebelumnya dengan sistem yang diperbarui dengan cepat serta pendataan yang menyeluruh maka dapat diperoleh informasi jumlah ketenagakerjaan yang dipastikan lebih akurat dan *real time*.

6. Peran dari sistem lain juga dapat ikut andil seperti sistem yang sudah diluncurkan pada pertengahan tahun 2016 yaitu Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja oleh pemerintah dan dari pihak penyedia lowongan kerja akademisi maupun swasta seperti Jobstreet, OLX, dan lainnya.

Konsep arsitektur teknologi yang diajukan melibatkan beberapa pihak stakeholder sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas pemerintahan, Perusahaan Negeri & Swasta
- Pemerintahan secara umum
- Penyedia informasi lowongan kerja (Instansi Pendidikan)
- Penyedia informasi lowongan kerja (Swasta, i.e : Jobstreet, OLX,)
- Masyarakat berusia produktif

Mengenai Manajer Pengambil keputusan dan kebutuhan fungsional dan contoh fitur aplikasi pada setiap stakeholder akan dijelaskan pada Tabel 2:

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional dan Fitur Aplikasi

Manajer Pengambil Keputusan	Kebutuhan Fungsional	Contoh Fitur Aplikasi
Dinas Tenaga Kerja	-Informasi jumlah masyarakat berusia produktif yang belum bekerja dan sudah bekerja (beserta detail)*1 -Informasi ketersediaan lapangan kerja*1,3,4 - Informasi tracking lokasi dan status kerja tenaga kerja*1	-Membuat kartu AK/I Digital*1 -Mengelola data kartu AK/I Digital sesuai batasannya*1 -Menghasilkan laporan terkait ketenagakerjaan*1 -Untuk kedepannya mampu menambahkan bahkan menggantikan fungsi SAKERNAS*1,2,3,4
Dinas pemerintahan, BUMN, Perusahaan Swasta	-Informasi pencari kerja yang <i>reliable</i> dan sesuai dengan kebutuhannya*1	-Mengelola data kartu AK/I Digital sesuai batasannya*1 -Menyampaikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat*1
Masyarakat Berusia Produktif (Angkatan Kerja)	-Informasi lowongan pekerjaan*1,3,4 -Layanan pengelolaan data diri dan Curriculum Vitae*1	-Mengelola data kartu AK/I Digital sesuai batasannya*1 -Mencari informasi lowongan pekerjaan sesuai keinginan*1,3,4

1 : SI KKD (konsep)
 2 : SI Dinas Tenaga Kerja (sudah ada)
 3 : SI 10 Juta Kesempatan Kerja (Pemerintah)
 4 : SI Penyedia Lapangan Kerja (Pemerintah, Swasta, Instansi Pendidikan)

Tampilan konsep *web* sebagai media pengelola data kartu AK/I Digital terlihat pada Gambar 4,5 dan 6 disertai penjelasan:

Tampilan Input Data Pencari Kerja

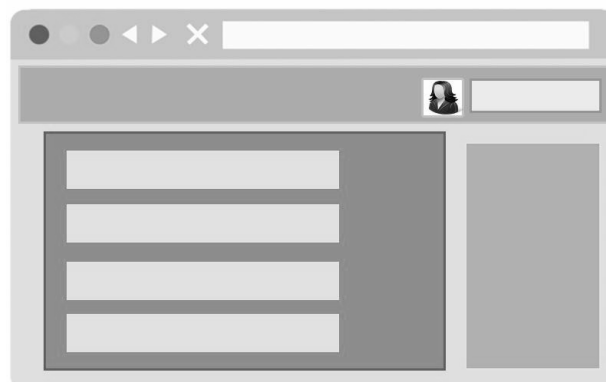


Gambar 4. Tampilan Input Data Pencari Kerja

Tampilan ini diakses oleh Dinas Tenaga Kerja setempat / tingkat Kabupaten ketika menginputkan data diri pencari kerja yang berisikan nama, alamat, tempat tanggal lahir, kontak yang dapat dihubungi, *email*, media sosial yang digunakan, riwayat pendidikan sampai jenjang terakhir dengan membawa fotocopy ijazah yang

sudah dilegalisir dan riwayat pekerjaan bagi yang sudah bekerja dengan melampirkan bukti riwayat kerja.

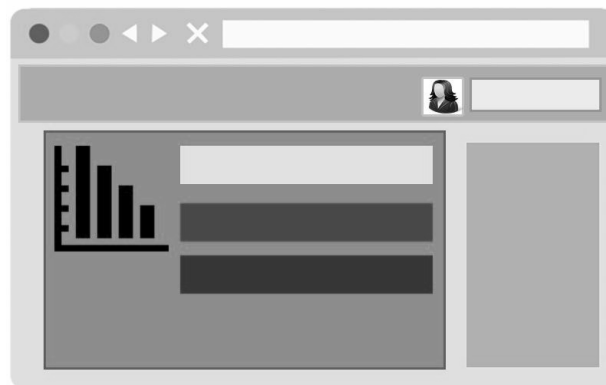
Tampilan Pencarian Lowongan Pekerjaan



Gambar 5. Tampilan Pencarian Lowongan Pekerjaan

Selain penyaluran informasi lowongan pekerjaan secara otomatis oleh sistem, bagi pencari kerja yang sudah memiliki kartu AK/I Digital dan terdaftar akan mendapatkan nomor unik dan *password* untuk *login* ke akun masing-masing, di sini pencari kerja atau *user* dapat mengakses layanan utama yaitu pencarian lowongan pekerjaan di mana *user* dapat mencari sesuai dengan jurusan dan keahlian atau pencarian berdasarkan regional. Detil dari lowongan pekerjaan seperti persyaratan, informasi alamat kantor dan sebagainya akan disajikan secara rinci.

Tampilan Data Statistik



Gambar 6. Tampilan Data Statistik

Untuk tampilan data statistik dapat diakses oleh pihak pemerintahan secara umum serta dinas yang terkait,disini tampilan berisi mengenai data pemilik kartu AK/I sebagai pencari kerja maupun sebagai pemilik kartu AK/I yang sudah bekerja.

Data diinputkan dan dikelola berdasarkan kolaborasi antara individu pemilik kartu, perusahaan atau dinas tempat bekerja, dan Dinas Tenaga Kerja.

Batasan dan cara kerja kartu AK/I Digital :

1. Kondisi belum berpengalaman dan sedang mencari pekerjaan :

Kartu AK/I Digital baru dibuat, dan berisi informasi diri secara umum, kompetensi diri, *curriculum vitae*, preferensi pekerjaan (inginnya bekerja seperti apa dan di mana)

2. Kondisi belum berpengalaman dan baru mendapat pekerjaan :

Kartu AK/I Digital baru dibuat, dan berisi informasi diri secara umum, kompetensi diri, *curriculum vitae*, preferensi pekerjaan (inginnya bekerja seperti apa, di mana), sedang bekerja di mana, sebagai apa, dan terhitung mulai tanggal.

3. Kondisi sudah berpengalaman dan sedang mencari kerja :

Kartu AK/I Digital berisi informasi diri secara umum, kompetensi diri, *curriculum vitae*, preferensi pekerjaan (inginnya bekerja seperti apa, di mana), pernah bekerja di mana, sebagai apa, sejak kapan, sampai kapan dan berhenti kenapa.

4. Data terkait kompetensi diri, riwayat pendidikan, preferensi pekerjaan dapat diubah secara manual oleh individu pemilik kartu.

5. Data terkait informasi identitas diri tidak dapat diubah manual dan sifatnya seperti data pada KTP.

6. Data terkait ketenagakerjaan tidak dapat diubah manual dan terisi otomatis setiap ada melalui fase tertentu (bekerja pada suatu perusahaan, berhenti bekerja dari suatu perusahaan).

Fungsi utama dari konsep sistem digitalisasi kartu AK/I ini adalah sebagai berikut :

- Menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan data terkait ketenagakerjaan yang *reliable*.
- Memudahkan proses perhitungan dan analisa data tenaga kerja, dan apabila berjalan dengan baik bahkan dapat menggantikan fungsi Sakernas.
- Dengan kerjasama yang dijalin antara pemerintah (termasuk dinas dan BUMN), perusahaan swasta, dan penyedia informasi lowongan kerja, maka dapat dibangun sebuah sinergi untuk melakukan penyediaan dan penyaluran informasi lowongan pekerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Kesimpulan

Konsep digitalisasi kartu AK/I ini menawarkan pengembangan fungsi yang sudah ada dan pembentukan sistem pendataan angkatan kerja yang lebih baik, dilengkapi dengan informasi preferensi dan

perkembangan para pencari kerja. Hasil dari masukan data pencari kerja dan informasi lowongan pekerjaan akan memiliki penghubung sehingga penyampaian informasi tersebut dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Pihak perusahaan negeri dan swasta akan memiliki referensi dan informasi tenaga kerja yang lebih lengkap dan dapat dipastikan kebenarannya karena merupakan hasil sinergi kelola dari para *stakeholder* yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] CIA, "CIA World Factbook" , Juli 2016, cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html (diakses tanggal 04 November 2016)
- [2] Badan Pusat Statistik, "Indonesia - Survei Angkatan Kerja Nasional Semester 1, Agustus 2016". Agustus 2016
- [3] Disnaker Ponorogo, Persyaratan AK/I, disnaker.ponorogo.go.id/persyaratan-ak1/ (diakses tanggal 04 November 2016)
- [4] Disnaker Sleman, Peresmian Pelayanan AK/I sesuai SMM ISO 9001:2008, Desember 2013, nakersos.slemankab.go.id/news/628/peresmian-pelayanan-ak-i (diakses tanggal 04 November 2016)
- [5] Badan Pusat Statistik, Metodologi Sakernas , bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab2 (diakses tanggal 04 November 2016)

Biodata Penulis

Awaludin Abid, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2013. Sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Yogyakarta. Dan sekarang mengajar sebagai Dosen pengganti di Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto.

Irwan Oyong, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Sistem Informasi STMIK Indonesia Banjarmasin, lulus tahun 2015. Sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Hasnan Afif, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2011. Sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Izzatil Ishmah Fajrin, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Sistem Informasi STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2016. Sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Informatika di STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Arief Munandar, memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom), Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta, lulus tahun 2016. Sedang

menempuh pendidikan Magister Teknik Informatika di
STMIK AMIKOM Yogyakarta.